

PEMERINTAH DESA - SHS

2025

PERBUP NO. 46, BD 2025/NO. 48, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar hukum penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pekalongan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan agar memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. UPTD PPA dibentuk untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, layanan hukum, serta pemantauan pemenuhan hak korban dan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan dan kedudukan UPTD PPA Kelas B, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi, susunan organisasi UPTD PPA, ketentuan kepegawaian, tata kerja, serta ketentuan peralihan dan penutup dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pekalongan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 November 2025, dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 47.

- I Lampiran 5 hal